

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Salah satu sebab utama yang membedakan sektor publik serta sektor swasta pada kegiatan organisasi, dimana sektor swasta berorientasi pada maksimalisasi laba sebaliknya sektor publik berorientasi pada pemberian layanan yang optimal untuk kebutuhan publik. Organisasi sektor publik itu sendiri merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik menggambarkan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik sebagai sorotan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan administrasi publik. Masyarakat kerap menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Anggapan buruk yang tengah terikat dengan sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi sektor publik saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan akan pentingnya memberikan perhatian, khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik.

Salah satu contoh organisasi sektor publik yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan publik adalah Pemerintahan Desa. Pada Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintahan desa itu sendiri berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomi desa implementasi dari otonomi daerah yang bercirikan pelayanan yang baik ditandai dengan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau. Masyarakat yang semakin

pandai dan tanggap juga menuntut lembaga publik memiliki transparansi dan rasa tanggung jawab publik. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan lembaga publik untuk menunjukkan penggunaan dana publik, namun juga kemampuan untuk memberikan jaminan atas penggunaan sumber dana publik, termasuk alokasi sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Organisasi pemerintah harus mengukur kinerja berdasarkan persyaratan transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Kinerja adalah keluaran/hasil dari suatu rencana/kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja organisasi publik harus dilihat dalam arti luas, yaitu menentukan keberhasilan organisasi saat memenuhi kebutuhan masyarakat serta melakukan perbaikan-perbaikan maupun peningkatan pelayanan untuk masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan organisasi sektor publik mengarah ke *good governance*. Organisasi yang sukses merupakan organisasi yang mempunyai visi dan misi yang jelas, terukur dan dapat teraktualisasi dalam kinerja organisasi.

Mengukur kinerja merupakan faktor penting dalam organisasi (termasuk organisasi sektor publik). Ada tiga tujuan untuk mengukur kinerja sektor publik. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dirancang untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Kedua, indikator kinerja sektor publik digunakan untuk alokasi sumber daya, kekuasaan dan pengambilan keputusan. Ketiga, indikator kinerja sektor publik dirancang untuk memastikan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai tanggung jawab organisasi untuk memberikan layanan pemerintah yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan untuk menunjukkan bagaimana dana publik digunakan, tetapi juga kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. (Mardiasmo 2018). Artinya bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mempengaruhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Halim and Kususfi 2012). *Value for*

*money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo 2018). Ekonomi merupakan interaksi antara pasar dan masukan (*cash of input*). Dengan istilah lain, ekonomi merupakan praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan menggunakan taraf kualitas tertentu dalam harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang meliputi pengelolaan secara cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu aktivitas operasional bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu, itu dianggap ekonomis. Ekonomi adalah hubungan antara *input* dengan *input value* yang dinyatakan satuan moneter. Efisiensi berhubungan erat menggunakan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses aktivitas operasional bisa dikatakan efisien bila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efektivitas dalam dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah interaksi antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif bila proses aktivitas mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Prinsip *value for money* dalam konteks pengukuran kinerja tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahan berdasarkan perencanaan dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan yang mereka miliki dengan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Pejabat birokrasi harus memiliki jiwa pengabdian dan melayani masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Mulyadi 2007).

Pemerintah desa wajib menyadari bahwa pelayanannya terhadap pengguna, khususnya masyarakat merupakan keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Masyarakat mempunyai hak mengetahui segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa salah satunya adalah Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berperan penting dalam implementasi keuangan desa dan pembangunan desa yang berkualitas. Dalam mewujudkan desa yang berkualitas maka Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember memiliki sejumlah rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember itu sendiri disetiap tahunnya melakukan pengukuran kinerja hanya saja belum pernah dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*, maka dari itu untuk memastikan bahwa rencana dan aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya dijalankan dengan benar dan memenuhi tujuan organisasi, diperlukannya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini penting untuk mengetahui kinerja Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam merealisasikan program-programnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan kinerja organisasi pemerintah yang kian menjadi sorotan dan belum dilakukannya pengukuran kinerja menggunakan konsep *value for money*, maka penelitian ini menganalisis kinerja Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menggunakan konsep *value for money* karena pada tahun 2017, 2019, dan 2020 dalam realisasi anggaran pendapatan setiap tahunnya menunjukkan kenaikan dan pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan, sedangkan pada realisasi anggaran belanja juga mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2019. Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penelitian, sehingga mengambil judul penelitian “**EVALUASI PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY (Studi Kasus Pada Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kinerja keuangan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017 sampai 2020 dikatakan ekonomis berdasarkan konsep *value for money* ?
2. Apakah kinerja keuangan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017 sampai 2020 dikatakan efisien berdasarkan konsep *value for money* ?
3. Apakah kinerja keuangan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017 sampai 2020 dikatakan efektif berdasarkan konsep *value for money* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur dan menganalisis apakah kinerja keuangan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017 sampai 2020 dikatakan ekonomis berdasarkan konsep *value for money*.
2. Untuk mengukur dan menganalisis apakah kinerja keuangan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017 sampai 2020 dikatakan efisien berdasarkan konsep *value for money*.
3. Untuk mengukur dan menganalisis apakah kinerja keuangan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017 sampai 2020 dikatakan efektif berdasarkan konsep *value for money*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa  
Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan masukan bagi pihak manajemen Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten

Jember tentang penyerapan anggaran dengan memperhatikan konsep *value for money* yang terdiri dari 3 yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman ilmiah tentang pengukuran kinerja dengan *value for money*.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan peneliti beserta pembaca lainnya. Penelitian ini bisa dijadikan pustaka acuan bagi peneliti lain yang terkait pada pengukuran kinerja.